



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HALIM MUSLIH**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **40637**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/96 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.106 m2/239 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 484.900.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER 2.4 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 375.612.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 671.352.383

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.111.864.383

III. HUTANG Rp. 285.411.785

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.826.452.598



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.